



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan. Prof. M. Yamin, SH .No. 65 Telp. (0376) 21208, Selong 83612

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

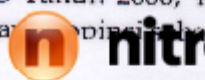
NOMOR : 441/0416.6/PK. IV/2008

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM AL-IKHLAS NW
POHGADING, DESA POHGADING KECAMATAN PRINGGABAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR :

- Membaca :** Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pondok Pesantren Darunnahdlatain NW Pancor Kabupaten Lombok Timur Nomor : 04/SMPLA-1.NW/POH/2007, tanggal 2 Agustus 2007 Tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Al-Ikhlash NW Pohgading Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya.
- Menimbang :**
- a. bahwa Keberadaan Lembaga Pendidikan dalam Jenjang Pendidikan dasar dengan jenis Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk menampung lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtid'iyah (MI) yang akan melanjutkan Pendidikannya di Desa Pohgading dan Wilayah sekitarnya sangat diperlukan dan mendesak ;
 - b. bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Al-Ikhlash NW Pohgading Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya yang telah beroperasi sejak Tahun Pelajaran 2007/2008 perlu diberikan izin operasional sebagai sebuah Lembaga Pendidikan yang definitif dengan status terdaftar di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud hurup a dan b, maka dipandang perlu memberikan izin Operasional bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Al-Ikhlash NW Pohgading Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang nomor : 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ;
 2. Undang-Undang nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
 3. Undang-Undang nomor : 33 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 4. Undang-Undang nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 5. Peraturan Pemerintah nomor : 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan



download

Created with



nitroPDF professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional